

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A'an Effendy dan Poernomo, Freddy., 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika : Jakarta.

Adjie, Habib., 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : Refika Aditama.

_____, 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama.

Ali, Zainuddin., 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur., 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Press.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at., 2012. *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press.

Darus, M. Luthfan Hadi., 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press.

Djodjodiharjo, M. A. Moegni., 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita.

Fuady, Munir., 2010. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

H.R., Ridwan., 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hs, Salim., 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammar, Abdulkadir., 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumi.

Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pelajar Pustaka.

- Nico., 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Setiawan, R., 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta.
- _____, 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung : Bina Cipta.
- Setiono., 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Subekti, R., 1996. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermedia.
- Sulhan., 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum) Buku 1*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Syahrani, Ridwan., 2002. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.
- Tedjosaputro, Liliana., 1985. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Titik Triwulan dan Febrian, Shinta., 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- R. Tjitrosudibio dan Subekti., 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Moeljatno., 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. cetakan ke-33. Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006. Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3. Jurnal

Arina Ratna Paramita, Yunanto, dan Hendrawati, Dewi., 2016. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang)*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 No. 3.

Mustamu, Julista., 2011. *Diskresi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Sasi Volume 17 No. 2 Bulan April-Juni.

Kumala Sari Rimba, Rika., 2016. “*Larangan Penerimaan Titipan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Notaris dan Kaitannya dengan Kode Etik Notaris*”. Lambung Mangkurat Law Journal Volume 1 issue 2.

Supriyadi, 2016., *Kedudukan Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Pertanahan*. Jurnal Arena Hukum, Volume 9 No. 2 Bulan Agustus.

4. Karya Ilmiah

Triani Putri, Dara, “Analisis Yuridis Terhadap Penitipan Sertipikat Kepada Notaris/PPAT Terkait Proses Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Bkt)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.

Tri Wahyuni, Verti, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta”,
Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

Pamungkas, Subarkah, “Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Terhadap
Minuta Akta Yang Hilang”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.